

BIAS TAFSIR AGAMA
SEBAGAI TANTANGAN
KEPALA DAERAH PEREMPUAN

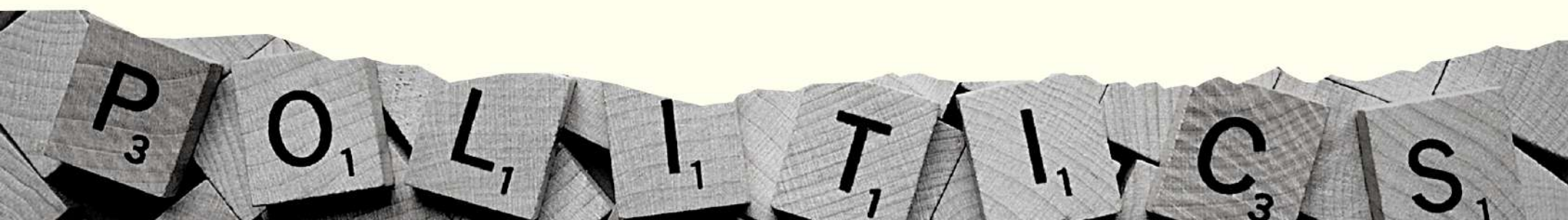


Kamu sadar gak, *sih*, kalau **jumlah kepala daerah perempuan angkanya sangat timpang** jika dibandingkan dengan kepala daerah laki-laki?

Yap, coba lihat **data Pilkada serentak** ini, *deh!*

Tahun Pilkada	Jumlah kepala daerah perempuan	Persentase
2015	23	8,36%
2017	10	7,43%
2018	15	8,77%
2020	27	11,02%

Sumber: KPU diolah oleh CWI.



Kalau diperhatikan, jumlah perempuan sebagai kepala daerah cenderung meningkat, *ya? Eits*, tapi **angka tersebut meningkat dengan sangat lambat dan masih jauh lebih rendah** daripada kepala daerah laki-laki.

Hmm. . . kira-kira apa, *ya*, yang menjadi tantangan kepala daerah perempuan? Lalu, ada gak, *sih*, tokoh kepala daerah perempuan yang bisa disoroti lebih jauh?

Yuk, simak!



NEGOSIASI IDENTITAS GENDER



Temuan riset Cakra Wikara Indonesia menunjukkan bahwa perempuan kepala daerah sering dituntut untuk melakukan negosiasi identitas gendernya. Dengan kata lain, karena kepala daerah tersebut perempuan, maka negosiasi diperlukan sebagai strategi untuk mengatasi hambatan dan tantangan yang dihadapi mereka sejak masa pencalonan, kampanye, hingga kepemimpinan.

Nah, salah satu kondisi yang membuat perempuan kepala daerah melakukan negosiasi identitas gendernya yaitu ada bias tafsir agama terhadap pemimpin perempuan.

TAFSIR AGAMA



Jika membicarakan agama, hal ini memang lekat dengan tafsir di mana terdapat tafsir yang mendukung perempuan dan melemahkan perempuan. **Dalam konteks Pilkada, narasi bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin sering digunakan** sebagai upaya menghalangi perempuan untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah terpilih.

Siapa, *sih*, kepala daerah perempuan yang pernah menghadapi tantangan ini?

SRI SUMARNI



Meet Sri Sumarni! Beliau adalah **Bupati Grobogan periode 2016–2021 dan 2021–2024**. Saat Pilkada 2010, Sumarni pernah menghadapi narasi yang disebar oleh lawan politiknya yang dikaitkan dengan **status Sumarni sebagai muslim dan memiliki kerabat non-muslim**. Narasi tersebut disebar melalui selebaran di tempat ibadah maupun media. Upaya itu **berhasil membuat Sumarni tidak terpilih pada Pilkada 2010**.

ANNE RATNA MUSTIKA

Next, ada Anne Ratna Mustika yang merupakan **Bupati Purwakarta periode 2018–2023**. Masih berkaitan dengan tafsir agama, Anne juga pernah dihadapkan dengan tokoh agama yang menyebarkan narasi bahwa **haram hukumnya memilih perempuan sebagai pemimpin untuk laki-laki**. Dalam hal ini, beberapa tokoh di Purwakarta menganggap bahwa perempuan sebagai pemimpin itu berbenturan dengan nilai Islam.



MIRNA ANNISA



Lanjut, ada Mirna Annisa! Beliau menjabat sebagai **Bupati Kendal di periode 2016–2021**. Serupa dengan pengalaman Sumarni dan Anne, di Pilkada Kendal 2015, Mirna juga harus **menghadapi tokoh-tokoh agama yang menyudutkannya dalam ceramah**.

Dari pengalaman tiga kepala daerah perempuan tersebut, terlihat, ya, bahwa perempuan harus bekerja dua kali lipat dibanding laki-laki untuk membuktikan bahwa mereka layak menjadi pemimpin.

Lalu, bagaimana caranya kepala daerah perempuan itu bisa

menghadapi tantangan yang berkaitan dengan tafsir agama?

2X

LIPAT



Untuk mengetahui jawabannya, baca laporan riset berjudul “Kepemimpinan Politik Delapan Kepala Daerah Perempuan: Tarik Ulur Relasi dan Identitas” yang diterbitkan Cakra Wikara Indonesia (2021).

Laporan Riset
Kepemimpinan Politik
Delapan Kepala Daerah Perempuan:
Tarik Ulur Relasi dan Identitas

Penulis :
Mia Novitasari
Roni
Dirga Ardiansa

Cakra Wikara Indonesia
2021



Kingdom of the Netherlands

Unduh di:

bit.ly/laporanrisetcwikepimpinanpolitik